

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA PURWASARI
KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS**

LUKKY FIRDAN

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah Kemampuan masyarakat dalam menyumbangkan pendapatnya tentang perencanaan pembangunan desa masih kurang. Hal ini terbukti saat dilaksanakan rapat tentang perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2015 diketahui dari 70 orang yang diundang yang hadir hanya 30 orang dan itupun tidak memberikan masukan atau gagasannya dalam perencanaan pembangunan. Kepedulian masyarakat masih kurang. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program pembangunan desa. Tidak adanya tarikan urunan desa atau iuran dari tahun 2010, tetapi swadaya dari masyarakat ada dalam pembangunan disusun masing-masing. Rumusan masalah dalam penelitian (1) Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa? (2) Hambatan-hambatan apa yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (3) Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi agar dapat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa? Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan sampel penelitian berjumlah 10 orang. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, telah dilaksanakan cukup baik sesuai dengan langkah-langkah partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (Mardikanto, 2013:82). Hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan. Hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, adalah kualitas SDM masyarakat. Kualitas SDM yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi sekolah masih kurang. Sarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya masih kurang. Kemampuan masyarakat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan, tidak semuanya mengerti. Kemampuan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan peningkatan SDM melalui sosialisasi oleh pegawai desa, meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan pembinaan rutin, berusaha bersikap lebih pro aktif serta lebih terbuka dan berusaha bersikap terbuka bagi siapa saja.

Kata Kunci: *Partisipasi Masyarakat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan.*

A. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dikemukakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Tuntutan otonomi daerah secara penuh terus dilakukan agar setiap daerah dapat memainkan peranan dan posisi yang strategis sebagai pemilik sumber daya di daerahnya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah juga diharapkan sebagai upaya untuk mempercayai masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengembangkan serta membangun potensi daerahnya sendiri. Dimana dominasi negara berubah menjadi institusi lokal, untuk itu peran serta langsung masyarakat sangat diperlukan dan terus diperkuat dan diperluas. Dengan demikian istilah partisipasi tidak sekedar menjadi retorika semata tetapi diaktualisasikan secara nyata dalam berbagai kegiatan dan pengambilan kebijakan pembangunan dari pusat, daerah ke desa.

Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa "Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan". Dalam Pasal 79 Ayat (1)

disebutkan bahwa, "Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota".

Dalam Pasal 114 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Tahun 2014 disebutkan bahwa: (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa; (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Lebih lanjut di tegaskan dalam Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bahwa, "Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa".

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 20 disebutkan bahwa, "Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari kepala Desa". Sedangkan pada pasal 23 disebutkan bahwa, "Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa".

Program pembangunan di kabupaten Ciamis, mengenai perencanaan pembangunan desa di atur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor

43 Tahun 2012 tentang Petunjuk pengembangan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 1 Butir 15 disebutkan bahwa, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program prioritas kewilayahan". Sementara dalam Pasal 1 Butir 16 disebutkan bahwa:

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa

Di desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terdapat Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pasal 1 angka (6) disebutkan bahwa:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) pasal 1 angka (7) disebutkan bahwa:

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi Desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas Pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas bahwa perencanaan pembangunan desa menjadi suatu

keharusan dilaksanakan baik untuk 1 tahun anggaran, maupun untuk 5 tahun anggaran. Sebab pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Strategi pembangunan yang terlalu sentralistik merupakan contoh ketidakpastian birokrasi masa lalu terhadap variasi pembangunan masyarakat lokal dan kurang tanggap terhadap kepentingan dan kebutuhan akan masyarakat di tingkat kecamatan dan desa. Hal ini menyebabkan partisipasi dan spirit masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal tidak dapat berkembang dengan wajar.

Perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan desa diperlukan agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan efisien, efektif, tepat pada sasaran, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Pembangunan daerah juga harus dapat berjalan dengan sinergi, terintegrasi, dan terpadu, baik antar wilayah, antar sektor, maupun antar tingkat pemerintahan. Koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal, dilakukan melalui mekanisme Musrenbang. Dalam Musrenbang, pelibatan seluruh *stakeholders* dan partisipasi publik adalah kunci utama dalam upaya mengefektifkan dan mengoptimalkan

proses perencanaan dan penganggaran dalam pembangunan daerah.

Partisipasi memang telah lama menjadi penghias bibir para pejabat dari tingkat pusat sampai tingkat desa bahwa pembangunan dan kelestarian hasil pembangunan tidak akan berhasil bila tidak didukung dengan "partisipasi masyarakat". Namun konsep partisipasi masyarakat yang digunakan oleh para pejabat jauh berbeda dengan konsep partisipasi yang sebenarnya. Partisipasi masyarakat menurut pejabat hanya ditekankan dalam hal pembayaran pajak, pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, penerapan teknologi yang diperkenalkan atau mengkonsumsi produk dalam negeri serta kontribusi materi yang berupa tanah, batu, semen, dan lain-lain.

Uraian mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat Davis dalam Sastroputro (2000:13) mengemukakan pengertian partisipasi sebagai berikut:

Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them.

Partisipasi sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab

terhadap usaha yang bersangkutan.

Partisipasi masyarakat merupakan suatu proses teknis untuk memberikan kesempatan dan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat untuk secara bersama-sama memecahkan berbagai persoalan. Carter dalam Rustiningsih (2002) menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan proses belajar masyarakat; mengarahkan masyarakat menuju masyarakat yang bertanggung jawab; mengeliminasi perasaan terasing sebagian masyarakat serta menimbulkan dukungan dan penerimaan dari pemerintah.

Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Anwas (2013: 41) mengemukakan bahwa:

Pembangunan secara umum identik dengan proses perubahan yang direncanakan, atau perbaikan kondisi menuju ke arah yang lebih baik. Pembangunan adalah sebuah upaya mencapai kemajuan bagi umat manusia. secara umum pembangunan seringkali dikaitkan dengan pencapaian dan

peningkatan kesejahteraan secara ekonomis.

Dengan demikian, maka pembangunan itu merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimensi waktu.

Tidak terkecuali dengan partisipasi masyarakat yang ada di Desa Purwasari Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Wacana partisipasi dalam perencanaan musrenbang tentu saja ada, namun realisasi di lapangan masih menunjukkan bahwa partisipasi tersebut belum maksimal. Hal ini tampak dengan adanya indikasi-indikasi sebagai berikut.

1. Kemampuan masyarakat dalam menyumbangkan pendapatnya tentang perencanaan pembangunan desa masih kurang. Hal ini terbukti saat dilaksanakan rapat tentang perencanaan pembangunan yang dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2015 diketahui dari 70 orang yang diundang yang hadir hanya 30 orang dan itupun tidak memberikan masukan atau gagasannya dalam perencanaan pembangunan.
2. Kepedulian masyarakat di desa Purwasari kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terhadap perencanaan pembangunan desa masih kurang. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui program pembangunan desa. Hal ini terbukti dari jumlah masyarakat yang hadir saat musrenbang desa hanya sebanyak 30 orang yang hadir

yang terdiri dari tokoh masyarakat, pemuda, tokoh agama, LPM, BPD, dinas intsnasi, dari SD 1, dari MI 1, tim monitoring kecamatan, kepala Desa, perangkat desa, TP-PKK, ketua RT/RW .

3. Tidak adanya tarikan urunan desa atau iuran dari tahun 2010, tetapi swadaya dari masyarakat ada dalam pembangunan didusun masing-masing. contoh dalam rehab jalan dan krimir jalan, bendungan, selokan, rehab mesjid, ada swadayanya. Pada 6 dusun tersebut tidak ada pemosisian mana yang unggul swadaya dari masyarakat dan mana yang tidak. Semuanya relatif sama.

Permasalahan yang terjadi adalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ?
3. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi agar dapat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis?

B. LANDASAN TEORITIS

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Partisipasi yang dimaksud seperti apa yang dirumuskan oleh Mardikanto (2014:81) berikut ini : "keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan". Sedangkan Bornby dalam Mardikanto (2014:81) mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk mengambil bagian yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari kegiatan dengan maksud memperoleh manfaat".

Melalui partisipasi masyarakat, diharapkan adanya masukan dari masyarakat dalam bentuk saran dan pendapat, barang, keterampilan bahan dan jasa. Hal ini sejalan dengan pendapat Davis dalam Sastropetro (1985:13), mengungkapkan bahwa:

Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them. Selanjutnya ia mengemukakan pula *There are three ideas in this definition which are important to managers who will practice the art of participation, most of them do agree on the importance of these three ideas.* Pendapat tersebut di atas dapat diterjemahkan sebagai berikut:

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggungjawab terhadap usaha yang bersangkutan. Di dalamnya terdapat tiga buah gagasan yang penting artinya bagi para manager/pemimpin yang hendak menerapkan suatu partisipasi dan kebanyakan dari mereka sependapat dengan tiga buah gagasan tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka jelas bahwa partisipasi merupakan salah satu bentuk keikutsertaan yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan program yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dalam proses pembangunan partisipasi dikelompokkan ke dalam empat kegiatan yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (Mardikanto, 2013:82).

Lebih jelasnya mengenai pendapat di atas tampak pada uraian berikut:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Pada umumnya setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan sumberdaya lokal dan alokasi anggarannya) selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal lebih mencerminkan sifat kebutuhan kelompok-kelompok

kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang program-program pembangunan di wilayah setempat atau tingkat lokal.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, seringkali diartikan sebagai partisipasi masyarakat banyak (yang umumnya lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya di dalam kegiatan pembangunan. di lain pihak, lapisan yang di atasnya (yang umumnya terdiri atas orang-orang kaya) dalam banyak hal lebih banyak memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut sumbangannya secara proporsional. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga kerja, uang tunai atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan dengan manfaat yang akan diterima oleh masing-masing warga masyarakat yang bersangkutan.

3. Partisipasi dalam Pemantauan dan evaluasi pembangunan

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang

diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

Jenis partisipasi dikemukakan oleh Sastropoetro, (1985:32) meliputi :

1. Partisipasi buah pikiran;
2. Partisipasi keterampilan;
3. Partisipasi tenaga;
4. Partisipasi harta benda; dan
5. Partisipasi Uang.

Sedangkan dimensi partisipasi masyarakat menurut Oakley (Sajoto, 2003:24) adalah sebagai berikut:

1. Kontribusi masyarakat;
2. Pengorganisasian masyarakat; dan
3. Pemberdayaan masyarakat'.

Mencermati kedua kutipan tersebut, maka dapat kita ketahui ada enam hal yang pokok yang perlu kita kembangkan bila ingin memperoleh partisipasi masyarakat. Dalam pembangunan. Adapun keenam hal tersebut adalah

kesadaran, minat, kreatifitas, merencanakan atau menyusun dan melaksanakan. Apabila keenam hal tersebut dimiliki oleh masyarakat maka hal lain yang perlu diperhatikan adalah aspek kepemimpinan yang diteraokan oleh pemerintah desa beserta aparatnya didalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya.

Partisipasi berdasarkan pendapat di atas berarti keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan masyarakat dengan hanya melihat dari segi lahiriahnya saja tanpa memperhitungkan bagaimana batiniah atau perasaannya. Para perumus kebijakan tidak memperdulikan apakah masyarakat melakukan partisipasi dengan rela atau karena terpaksa. Akan tetapi agar partisipasi dapat tercipta maka harus ada kerjasama antara perumus kebijakan yaitu pemerintah dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan karena itu mutlak diperlukan peran aktif masyarakat di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Tjokroamidjojo (2005:206), yang berpendapat bahwa: "Berhasilnya pencapaian tujuan-tujuan pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat pada umumnya, tidak saja dari pengambilan kebijakan tinggi, para perencana, aparatur pelaksana operasional, tetapi juga dari petani-petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, para pengusaha dan lain-lain" Suatu rancangan pembangunan akan tercapai apabila adanya keterlibatan aktif masyarakat banyak yang biasa disebut

partisipasi. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk penyusunan, penentuan dan pengambilan kebijakan.

Menurut Bintoro dalam Ndraha (1990:14) mengatakan bahwa partisipasi adalah: "Partisipasi dilakukan oleh masyarakat sebagai keterlibatan Masyarakat dalam penentuan arah, strategi, dan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan". Pendapat tersebut dinyatakan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat juga dilihat dalam memikul beban dan memetik hasil atau manfaat dari pembangunan. Partisipasi masyarakat tersebut tidak terlihat tanpa dikembangkan dan ditumbuhkan terlebih dahulu.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan metode tersebut karena "Metode deskriptif merupakan metode yang memusatkan perhatian pada aspek-aspek tertentu yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilakukan" (Surakhmad, 2002:96). Adapun tujuannya ialah "Mendeskripsikan sesuatu secara sistematis, faktual dan akurat mengenai berbagai faktor serta hubungan antar fenomena yang diselidiki" (Nazir, 2000:63). Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena

sosial dari sudut atau perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya.

Penelitian ini dirancang mengikuti model interaktif dari Maxwell (dalam Alwasilah, 2003:86), yang mempertimbangkan keselarasan keenam komponen berikut: (1) problem penelitian; (2) pertanyaan penelitian; (3) tujuan penelitian; (4) metode penelitian; dan (6) validitas penelitian

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Berdasarkan serangkaian kegiatan penelitian, maka penulis menyajikan pembahasan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis.

Menurut Madikanto (2013:82), bahwa dalam proses pembangunan partisipasi dikelompokkan ke dalam empat kegiatan yaitu: partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Hal ini dilaksanakan di Desa Purwasari

Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, adalah:

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari dimensi partisipasi dalam pengambilan keputusan, diketahui bahwa jawaban terhadap indikator masyarakat ikut menyumbangkan pendapatnya tentang perencanaan pembangunan, diketahui hanya 8 orang (80%) informan mengatakan partisipasi masyarakat dalam menentukan keputusan pada proses perencanaan pembangunan sudah baik, 2 orang (20%) informan mengatakan hanya sebagian masyarakat antusias dalam menentukan perencanaan pembangunan melalui musyawarah dusun dan di lanjutkan musrenbang. Dengan demikian maka pada kenyataannya sebagian besar masyarakat yang menjadi perwakilan dari tiap-tiap dusun berpartisipasi dalam menentukan keputusan pada proses perencanaan pembangunan. Sementara itu jawaban terhadap indikator masyarakat ikut memberikan sumbangan pemikiran pada saat pengambilan keputusan diketahui terdapat 6 orang (60%) masyarakat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan pemikiran pada saat pengambilan keputusan dilaksanakan dengan baik, 4 orang (40%) informan mengatakan menunggu saja keputusan yang telah disepalati dan menyetujuinya tanpa harus menyumbangkan pikirannya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam proses penentuan keputusan yang diambil dalam proses perumusan perencanaan musrenbang, dilakukan dengan cara mengundang perwakilan dari masing-masing dusun, untuk hadir pada saat musrenbangdes dengan membawa misi masing-masing desa. Kemudian keputusan diambil sesuai dengan kesepakatan bersama.

Hasil di atas sejalan menunjukkan bahwa setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

b. Partisipasi pelaksanaan

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari dimensi partisipasi pelaksanaan dilihat dari indikator masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan tenaganya saat pelaksanaan perencanaan pembangunan dan indikator partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan kepada kepala desa dan pegawai Desa Purwasari mengenai kapan dan dimana pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan bahwa semua informan menyatakan bahwa dalam hal tenaga, semua informan belum merasa pernah ikut

menyumbangkan tenaganya, namun apabila dibutuhkan semua informan menyatakan siap untuk menyumbangkan tenaganya dalam bentuk apapun dan masyarakat menunggu informasi dari kepala desa dan pegawai Desa Purwasari mengenai kapan dan dimana pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak memerlukan tenaga (fisik) melainkan pemikiran. Sehingga apabila mereka ditanya pernah atau tidaknya menyumbangkan tenaga tentu saja mereka akan memberikan jawaban tidak pernah. Sebab yang dituntut kepada mereka adalah pemikiran.

Sumbangan tenaga diberikan oleh ibu-ibu PKK untuk menyajikan tempat serta makanan pada saat Musrenbangdes, sehingga sumbangan tersebut dirasakan sangat bermanfaat. Selain itu pemuda pemudi yang tergabung dalam kumpulan pemuda pemudi desa Purwasari, mempersiapkan tempat untuk melaksanakan musrenbang desa, dari mulai kursi, tata letak ruangan dan sebagainya.

c. Partisipasi dalam Pemantauan dan evaluasi pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari dimensi partisipasi dalam Pemantauan dan evaluasi pembangunan dengan indikator partisipasi masyarakat

dalam mengawasi atau melakukan pemantauan terhadap jalannya perencanaan pembangunan, dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses perencanaan pembangunan diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam mengawasi atau melakukan pemantauan terhadap jalannya perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan baik. Namun tidak semua menjadi pemantau yang serius, melainkan hanya sebatas mengetahuinya saja dan seluruh informan memberikan pemantauan terhadap jalannya perencanaan pembangunan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa dalam proses pemantauan telah dibentuk tim yang diketuai oleh BPD, sehingga masyarakat tidak perlu terlalu serius memantau jalannya perencanaan pembangunan, cukup dengan mempercayakan saja pada BPD.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek pembangunan sangat diperlukan. Bukan saja agar tujuannya dapat dicapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.

d. Evaluasi

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari dimensi Evaluasi dengan indikator partisipasi masyarakat dalam

memberikan pendapatnya sehubungan dengan kegiatan evaluasi proses perencanaan pembangunan dikerahui partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapatnya sehubungan dengan kegiatan evaluasi proses perencanaan pembangunan. Sedangkan indikator partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan pikirannya sehubungan dengan kegiatan evaluasi proses perencanaan pembangunan, diketahui bahwa 7 orang (70%) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan pikirannya sehubungan dengan kegiatan evaluasi proses perencanaan pembangunan sudah baik. 3 orang (30%) menyatakan bahwa tidak pernah berpartisipasi kepada masyarakat dalam menyumbangkan pikirannya sehubungan dengan kegiatan evaluasi proses perencanaan pembangunan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa selama ini partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapatnya sehubungan dengan kegiatan evaluasi proses perencanaan pembangunan ditampung pada saat pelaksanaan evaluasi hasil pembangunan. Semua masukan dicatat sebagai bukti keberhasilan pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam memberikan pendapatnya sehubungan dengan kegiatan evaluasi proses perencanaan

pembangunan dibuktikan dengan adanya beberapa perubahan, hasil musyawarah dan diambil berdasarkan kesepakatan bersama. proses evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses dan hasil yang diperoleh setelah dilakukan perencanaan.

e. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian dilihat dari dimensi partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat 8 orang (80%) informan menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan selalu dilaksanakan, 2 orang (20%) informan menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Seperti pemanfaatan gedung olahraga, untuk kebutuhan olahraga dan dipergunakan oleh masyarakat yang suka berolahraga.

Partisipasi masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dibuktikan dengan bersama-sama membersihkan

sekitar lingkungan untuk menjaga dan memelihara hasil musrenbang.

Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan merupakan unsur terpenting yang sering terlupakan. Sebab tujuan pembangunan adalah untuk memperbaiki mutu masyarakat banyak sehingga pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping itu pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap program pembangunan yang akan datang.

2. Analisis Hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Hambatan yang dihadapi oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Purwasari adalah Hambatan pertama yang dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terutama untuk memenuhi dimensi partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah kualitas SDM masyarakat. Kualitas SDM yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat untuk mewujudkan visi

dan misi sekolah masih kurang. Hambatan kedua yang dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terutama dalam dimensi Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan adalah sarama pendukung pelaksanaan kegiatan dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya masih kurang. Hambatan ketiga yang dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terutama dalam dimensi Partisipasi dalam Pemantauan dan evaluasi pembangunan adalah kemampuan masyarakat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan, tidak semuanya mengerti. Hambatan keempat yang dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terutama dalam dimensi Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan adalah kemampuan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

3. Analisis Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa

Purwasari di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis adalah untuk mengatasi hambatan pertama yang dihadapi oleh masyarakat dalam mewujudkan berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, maka telah dilakukan peningkatan SDM melalui sosialisasi oleh pegawai desa. Untuk mengatasi hambatan kedua yang dihadapi oleh masyarakat dalam mewujudkan berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan pembinaan rutin. Untuk mengatasi hambatan ketiga yang dihadapi oleh pegawai dalam berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan dengan berusaha bersikap lebih pro aktif serta lebih terbuka. Untuk mengatasi hambatan keempat yang dihadapi oleh pegawai dalam berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan dengan berusaha bersikap terbuka bagi siapa saja.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Partispasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, telah dilaksanakan cukup baik sesuai dengan langkah-langkah partisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (Mardikanto, 2013:82). Hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis sesuai dengan ketentuan.
- b. Hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, adalah pertama pembangunan desa di Desa Purwasari di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terutama untuk memenuhi dimensi partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah kualitas SDM masyarakat rendah. Kualitas SDM yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi sekolah masih

kurang. Hambatan kedua yang dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terutama dalam dimensi Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan adalah sarama pendukung pelaksanaan kegiatan dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya masih kurang. Hambatan ketiga yang dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terutama dalam dimensi Partisipasi dalam Pemantauan dan evaluasi pembangunan adalah kemampuan masyarakat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan, tidak semuanya mengerti. Hambatan keempat yang dihadapi oleh masyarakat dalam berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis terutama dalam dimensi Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan adalah kemampuan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

- c. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan

yang dihadapi masyarakat untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari di Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis adalah untuk mengatasi hambatan pertama yang dihadapi oleh masyarakat dalam mewujudkan berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, maka telah dilakukan peningkatan SDM melalui sosialisasi oleh pegawai desa. Untuk mengatasi hambatan kedua yang dihadapi oleh masyarakat dalam mewujudkan berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui meningkatkan kesadaran masyarakat dengan memberikan pembinaan rutin. Untuk mengatasi hambatan ketiga yang dihadapi oleh pegawai dalam berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan dengan berusaha bersikap lebih pro aktif serta lebih terbuka. Untuk mengatasi hambatan keempat yang dihadapi oleh pegawai dalam berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan dengan berusaha bersikap terbuka bagi siapa saja.

Saran

- b. Agar perencanaan pembangunan berjalan dengan baik, maka masyarakat harus berpartisipasi dalam

- pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi serta partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
- c. Supaya hambatan dapat diminimalisir maka kepala desa harus melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengarahan.
- d. Supaya upaya ada perbaikan, maka masyarakat harus merealisasikan upaya-upaya yang sedang dilaksanakan, dan merencanakan upaya baru sebagai perbaikan dari upaya yang telah dilaksanakan.
- Tjokroamidjojo. 2005 *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Ndraha. 1990. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta : PT. Bina Aksara.
- Surakhmad. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Alfabeta.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Sastropoetro, Santoso 2008. *Partisipasi, Komunikasi, Persepsi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: LP3ES
- Anwas. 2013. *Pemberdayaan Daerah Perkotaan*. Bandung: Gramedia.
- Mardikanto, Totok & Subianto, Poerwoko. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dalam perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sajoto, 2003 *Pemberdayaan (empowerment), Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Centre for strategic and international studies.